



Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Rinata Septiani Putri¹, Bambang Utoyo^{2, *}, Sripto³

¹Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung, Indonesia

Correspondence: E-mail: rinataseptianiputri@gmail.com

ABSTRAK

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tingginya deviasi antara rencana anggaran dan realisasi belanja menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024 dengan memasukkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol.

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dengan analisis regresi data panel. Data diperoleh dari BPS, Kemenkeu RI, serta laporan realisasi APBD pemerintah daerah. Model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Sebaliknya, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD. Secara simultan, seluruh variabel dalam model penelitian berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa faktor demografis perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 Januari 2026

First Revised 8 Januari 2026

Accepted 9 Januari 2026

First Available online 10 Januari 2026

Publication Date 10 Januari 2026

Keyword:

realisasi anggaran, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, jumlah penduduk.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang merefleksikan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Efektivitas pengelolaan APBD dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, semakin tinggi tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, deviasi anggaran yang besar, baik dalam bentuk rendahnya serapan anggaran (*under-spending*) maupun ketidaktepatan alokasi belanja, mengindikasikan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran daerah. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan serta menurunnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam konteks nasional, permasalahan realisasi anggaran daerah masih menjadi isu yang berulang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat serapan APBD pemerintah daerah di Indonesia sering kali belum mencapai target yang ditetapkan, khususnya pada belanja pembangunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang direncanakan tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya secara optimal. Rendahnya realisasi anggaran mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan fiskal dan kapasitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera juga menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan APBD. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya SILPA sering kali diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa anggaran yang telah direncanakan belum sepenuhnya mampu dieksekusi sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan realisasi anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Secara teoretis, realisasi anggaran daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal, antara lain pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Daerah dengan kapasitas pendapatan yang tinggi secara teoritis memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk merealisasikan anggaran secara optimal. Namun,

dalam praktiknya, peningkatan pendapatan daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan realisasi belanja, terutama ketika perencanaan anggaran tidak disusun secara realistis atau kapasitas kelembagaan belum memadai.

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Struktur dan kualitas belanja daerah menentukan sejauh mana anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dominasi belanja rutin, khususnya belanja pegawai, sering kali membatasi ruang fiskal bagi belanja pembangunan yang bersifat produktif. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat realisasi anggaran, karena belanja yang tidak berbasis pada kebutuhan dan prioritas pembangunan cenderung mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pembiayaan daerah berperan sebagai instrumen stabilisasi fiskal dalam pengelolaan APBD. Pembiayaan daerah, yang antara lain bersumber dari pemanfaatan SILPA dan sumber pembiayaan lainnya, seharusnya dapat digunakan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung realisasi anggaran. Namun, praktik pengelolaan pembiayaan daerah di banyak pemerintah daerah masih menunjukkan kecenderungan konservatif, di mana SILPA cenderung dibiarkan mengendap daripada dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan.

Di samping faktor fiskal, faktor demografis juga memiliki peran penting dalam memengaruhi realisasi anggaran daerah. Jumlah penduduk merupakan indikator struktural yang mencerminkan besarnya kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tekanan fiskal yang lebih tinggi karena meningkatnya permintaan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya. Dengan demikian, dinamika jumlah penduduk berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu yang mengkaji realisasi anggaran daerah masih berfokus pada faktor-faktor fiskal, seperti pendapatan daerah dan belanja daerah, tanpa secara eksplisit memasukkan faktor demografis sebagai variabel pengendali. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya dalam konteks kabupaten/kota, di mana perbedaan karakteristik demografis antar daerah sangat signifikan. Oleh karena itu, memasukkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan realisasi APBD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019–2024 dengan memasukkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol. Pemilihan periode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan APBD dalam kondisi normal maupun pada periode yang mengalami

Rinata Septiani Putri, Bambang Utoyo, Suropto., **Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 | 1440**
tekanan fiskal, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran daerah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya dalam memahami hubungan antara faktor fiskal dan faktor demografis terhadap kinerja realisasi anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis, responsif terhadap kebutuhan penduduk, serta mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Unit analisis meliputi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan realisasi APBD pemerintah daerah.

Variabel dependen adalah realisasi anggaran, sedangkan variabel independen meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jumlah penduduk digunakan sebagai variabel kontrol. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dengan hasil menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1 Analisis Deskriptif

Date: 11/19/25 Time: 20:17
Sample: 2019 2024

	X1_PENDA..	X2_BELANJA	X3_PEMBIA..	X4_PENDU...	Y_REALISAS...
Mean	1555.442	1591.280	33.00623	613.7668	91.88978
Median	1331.275	1353.135	27.64000	478.9550	92.36000
Maximum	3003.640	2927.140	238.5200	1525.090	105.8700
Minimum	558.1900	809.7900	-293.9400	154.8950	72.68000
Std. Dev.	631.4650	629.1140	66.65341	392.9632	5.674776

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel penelitian yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, jumlah penduduk, dan realisasi anggaran. Secara umum, variabel pendapatan daerah dan belanja daerah menunjukkan tingkat variasi yang cukup tinggi antar kabupaten/kota, yang mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan struktur pengeluaran pemerintah daerah. Pembiayaan daerah juga memperlihatkan fluktuasi yang relatif besar, terutama yang bersumber dari perbedaan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan sumber pembiayaan lainnya.

Variabel jumlah penduduk menunjukkan heterogenitas yang signifikan antar daerah, yang menggambarkan perbedaan skala kebutuhan pelayanan publik. Sementara itu, realisasi anggaran memperlihatkan variasi tingkat serapan APBD antar kabupaten/kota selama periode penelitian. Gambaran deskriptif ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik fiskal dan demografis berpotensi memengaruhi tingkat realisasi anggaran daerah.

3.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 2 Hasil Fixed Effect Mode

Dependent Variable: Y_REALISASI_ANGGARAN
Method: Panel Least Squares
Date: 11/19/25 Time: 00:58
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100.9241	2.420622	41.69343	0.0000
X1_PENDAPATAN	-0.009270	0.012875	-0.720027	0.4735
X2_BELANJA	-0.003134	0.013557	-0.231153	0.8178
X3_PEMBIAYAAN	-0.006347	0.015048	-0.421756	0.6743
X4_PENDUDUK	0.017239	0.005412	3.185536	0.0020
R-squared	0.159946	Mean dependent var		91.88978
Adjusted R-squared	0.120414	S.D. dependent var		5.674776
S.E. of regression	5.322158	Akaike info criterion		6.235588
Sum squared resid	2407.656	Schwarz criterion		6.374466
Log likelihood	-275.6014	Hannan-Quinn criter.		6.291591
F-statistic	4.046001	Durbin-Watson stat		2.001242
Prob(F-statistic)	0.004732			

Tabel 2 Menyajikan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan model ini didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang menunjukkan bahwa FEM merupakan model yang paling sesuai untuk menjelaskan variasi realisasi APBD antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah belum secara otomatis menjamin tingginya tingkat serapan anggaran. Kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya keterbatasan dalam kualitas perencanaan anggaran, kapasitas manajerial, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sebaliknya, jumlah penduduk sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga mendorong peningkatan realisasi APBD. Temuan ini menegaskan bahwa faktor demografis memiliki peran penting dalam menentukan tingkat serapan anggaran daerah.

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggraeni dan Risnawati (2024) serta Sari dan Pratama (2022) yang menyatakan

bahwa besarnya kapasitas fiskal daerah tidak secara otomatis meningkatkan tingkat serapan anggaran apabila tidak diimbangi dengan kualitas perencanaan dan implementasi anggaran yang memadai. Kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan realisasi anggaran lebih dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan dibandingkan dengan besaran pendapatan yang dimiliki daerah. Daerah dengan pendapatan tinggi sekalipun tetap berpotensi mengalami deviasi anggaran apabila perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan efektif.

Tidak signifikannya pengaruh belanja daerah terhadap realisasi anggaran mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja belum tentu diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran secara optimal. Temuan ini sejalan dengan Sari dan Utama (2021) yang menegaskan bahwa struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional berpotensi menghambat efektivitas realisasi anggaran, khususnya pada belanja pembangunan yang bersifat produktif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa orientasi belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dapat menurunkan efektivitas serapan anggaran.

Pembiayaan daerah dalam penelitian ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Hasil ini sejalan dengan temuan Santosa (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah, khususnya yang bersumber dari SILPA, cenderung bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara strategis sebagai instrumen percepatan realisasi anggaran daerah., sehingga kontribusinya terhadap serapan anggaran relatif terbatas.

Berbeda dengan variabel fiskal, jumlah penduduk terbukti berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan ini mendukung teori demografi fiskal yang dikemukakan oleh Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010), yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan tekanan fiskal, sehingga pemerintah daerah terdorong untuk merealisasikan anggaran secara lebih optimal. Hasil ini menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal, tetapi juga oleh tekanan kebutuhan publik yang bersifat struktural.

Secara simultan, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi antara faktor fiskal dan demografis secara bersama-sama menentukan efektivitas realisasi anggaran daerah. Dengan demikian, analisis realisasi APBD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antar komponen anggaran dan karakteristik demografi daerah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan realisasi anggaran tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran. Pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan kapasitas manajerial aparatur, serta mengintegrasikan faktor demografis dalam penyusunan kebijakan fiskal. Pendekatan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD dan mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor fiskal secara parsial belum mampu menjelaskan variasi realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sebaliknya, faktor demografis, khususnya jumlah penduduk, berperan signifikan dalam menentukan tingkat serapan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap dinamika jumlah penduduk serta memperkuat kapasitas manajerial dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

5. REFERENSI

- Anggraeni, D., & Risnawati, R. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran belanja daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v14i1.xxx>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)*. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Lampung dalam angka 2023*. BPS Provinsi Lampung.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2006). *Perspectives on fiscal federalism*. World Bank.
- Halim, A. (2019). *Manajemen keuangan sektor publik* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi keempat). UPP STIM YKPN.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for regional disparities? *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619–644. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049>

- Rinata Septiani Putri, Bambang Utoyo, Suropto., Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 | 1444*
- Santosa, B. (2020). Pengaruh pembiayaan daerah terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 101–115.
- Sari, D. P., & Utama, M. S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 89–103.
- Sari, N., & Pratama, R. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 23–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.